

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama perusahaan yaitu *profit oriented*, dengan mendapat laba yang dimanfaatkan dalam memprediksi kinerja tinggi guna menarik minat investor dalam menginvestasikan modalnya. Nilai perusahaan dapat meningkat karena hal ini. Jika laba merupakan indikator kinerja keuangan yang baik, maka perusahaan tersebut berkualitas tinggi. Pemilik perusahaan umumnya mempercayakan pengelolaan sumber dayanya kepada manajemen. Selanjutnya, manajemen bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut kepada pemilik melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat secara terstruktur dan sesuai dengan data sebenarnya mencerminkan kondisi nyata serta pencapaian perusahaan dalam periode tertentu. Evaluasi internal dan eksternal atas kesuksesan finansial bergantung pada data ini. Insentif, bonus manajemen, dan tinjauan kinerja hanyalah beberapa contoh bagaimana laba biasanya digunakan sebagai tolok ukur pengambilan keputusan. Berbagai pihak seperti investor, kreditur, pemerintah, bank, dan manajemen, menggunakan laba sebagai indikator penting. Bagi investor dan kreditur, laba membantu menilai risiko investasi atau pinjaman. Sementara bagi manajemen, laba bisa menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi, seperti memaksimalkan bonus atau kepuasan jabatan.

Untuk mencegah pengguna laporan mendeteksi kondisi kinerja perusahaan dengan tepat, manajemen menggunakan manajemen laba sebagai strategi. Upaya ini dimaksudkan untuk menyajikan kembali informasi akuntansi agar menampilkan

gambaran yang berbeda. Manajemen laba bisa dilaksanakan melalui praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, serta *income maximization* (Scoot, 2000). Perusahaan-perusahaan besar kerap menerapkan manajemen laba (*earning management*) guna memperoleh keuntungan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun para manajernya. Motivasi inilah yang mendorong manajer untuk mengambil berbagai tindakan guna mencapai tujuan mereka. Manajemen, dalam kapasitasnya sebagai pelaksana dan sebagai individu yang bertanggung jawab atas operasi operasional perusahaan, dapat memengaruhi lintasan laba perusahaan dengan mendefinisikan teknik akuntansi tertentu. Mereka memanfaatkan celah dalam aktivitas atau peristiwa tertentu untuk melakukan rekayasa laba di perusahaan.

Fenomena manajemen laba dapat diamati pada peristiwa yang melibatkan PT Garuda Indonesia Tbk di tahun 2018. Perusahaan itu melaporkan keuntungan sebesar US\$5 juta (sekitar Rp83,9 miliar berdasarkan kurs 2025). Namun setelah dilakukan penyesuaian pencatatan, terbukti maskapai ini malah menderita defisit senilai US\$175 juta (setara Rp2,93 triliun), akibatnya, jelas bahwa manajemen telah menyajikan laporan keuangan yang tidak patuh. Hal ini membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi sebesar Rp1,25 miliar. Sanksi ini tidak hanya dibebankan kepada perusahaan sebagai entitas hukum, tetapi juga kepada jajaran direksi dan komisaris yang bertanggung jawab.

Belum lama ini, PT Indofarma Tbk (INAF) menjadi pusat perhatian akibat kasus yang terkait dengan manajemen laba di Indonesia. Indofarma (INAF) mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, perusahaan mencatat laba bersih Rp7,96 miliar, namun pada 2020 labanya anjlok 99,65% menjadi hanya Rp27,58 juta. Situasi semakin memburuk di 2021 ketika INAF justru merugi Rp37,58 miliar. Kerugian terus melonjak pada 2022

mencapai Rp428 miliar atau naik 1.056% dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, kerugian Indofarma pada Semester I-2023 bertambah besar sekitar Rp29,63 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp120,34 miliar.

Dari fenomena yang terjadi, manajer kerap menerapkan berbagai strategi manajemen laba, salah satunya dalam penyusunan laporan pajak dan pengelolaan ukuran perusahaan. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, pajak mendorong pemerintah dalam memaksimalkan pemungutan pajak melalui peraturan dan perundang-undangan dikarenakan pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Tujuan para manajer untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan sering kali bertolak belakang dengan strategi pemerintah guna memaksimalkan pendapatan negara yang asalnya dari pajak. Untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan, para manajer didorong oleh konflik kepentingan ini untuk mencari celah hukum..

Strategi yang digunakan oleh manajer untuk mengurangi kewajiban pajak disebut *tax planning*. Perencanaan pajak yaitu pendekatan yang valid dalam mengelola aktivitas keuangan wajib pajak guna meminimalkan kewajiban pajak mereka, termasuk PPh dan pajak lainnya, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku (Sari Rioni & Junawan, 2021). Dengan demikian, perusahaan di Indonesia menggunakan strategi perencanaan pajak dalam upaya menekan beban pajak perusahaan dengan cara yang tidak melanggar aturan karena pemerintah sendiri memperbolehkannya selama masih sesuai dengan undang-undang perpajakan di Indonesia (Parlindungan, 2022).

Sejumlah riset sebelumnya menemukan terdapatnya korelasi positif antara praktik perencanaan pajak dengan manajemen laba. Misalnya dalam studi Azzahra & Aprilina (2024) mengemukakan bahwasanya perencanaan pajak pengaruhnya positif pada manajemen laba. Manajemen menggunakan perencanaan pajak untuk

memastikan jumlah pajak yang tepat supaya dibayarkan dan strategi untuk meminimalkan pembayaran tersebut. Hal itu selaras terhadap penelitian Parlindungan (2022) yang mengungkapkan bahwasanya adanya perencanaan pajak akan memberi pengaruh pada besaran manajemen laba perusahaan. Dalam studi lain oleh Rohman dkk. (2022) juga mengemukakan peningkatan dalam aktivitas perencanaan pajak sebuah perusahaan mengindikasikan adanya peningkatan pula dalam tindakan manajemen laba.

Akan tetapi dalam riset Sari Rioni & Junawan (2021) menyimpulkan bahwa tidak ditemukan terdapatnya hubungan yang signifikan diantara perencanaan pajak dengan manajemen laba apabila manajemen perusahaan kurang sigap memanfaatkan perubahan kebijakan pemerintah. Dalam penelitian Zhafirah dkk. (2022) manajemen cenderung mengabaikan pentingnya perencanaan pajak yang efektif karena lebih terfokus pada upaya untuk memperoleh bonus. Di penelitian lain oleh Silalahi & Ginting (2022) juga menyatakan bahwasanya perencanaan pajak yang dilaksanakan tak menjamin terjadinya manajemen laba.

Manajer dapat mengatur laba dengan salah satunya mengelola ukuran perusahaan. Perusahaan dapat dikategorikan secara luas menjadi tiga ukuran: besar, sedang, dan kecil (Astria dkk., 2021). Pihak eksternal, termasuk investor dan pemerintah, cenderung mengawasi perusahaan-perusahaan besar dengan lebih ketat. Oleh karena itu, agar beban pajak mereka serendah mungkin, mereka memilih untuk tidak meningkatkan laba secara signifikan. Perusahaan dengan sumber daya yang lebih besar cenderung menggunakan strategi pemerataan atau penekanan laba untuk memanipulasi hasil mereka.

Beberapa riset terdahulu memperlihatkan jika ukuran perusahaan punya pengaruh pada manajemen laba. Studi Zhafirah dkk. (2022) menegaskan bahwasanya

perusahaan besar diharapkan menghasilkan laba besar, sehingga mendorong para manajer untuk terlibat dalam manajemen laba yang cermat. Penelitian oleh Setiowati dkk. (2023) terdapat gagasan bahwa perusahaan besar cenderung ingin membagi pendapatan mereka secara merata. Dan dalam penelitian Karina & Sutarti (2021) juga mengatakan bahwasanya perusahaan berskala besar akan lebih hati-hati saat menyusun laporan keuangan demi menyajikan laporan keuangan yang tepat.

Akan tetapi, temuan yang berbeda diperlihatkan pada penelitian Astriah dkk. (2021) yang mengungkap jika ukuran perusahaan tidak signifikan memengaruhi manajemen laba. Studi lain dari Rohmah & Meirini (2022) juga mengatakan bahwa ukuran perusahaan yang berskala besar tak menjadikan perusahaan meminimalkan kegiatan manajemen laba. Dan dalam penelitian Sari & Susilowati (2021) juga menegaskan bahwasanya ukuran perusahaan yang besar belum tentu menjamin dapat mempengaruhi atau menurunkan tindakan manajemen laba.

Pengaruh perencanaan pajak serta ukuran perusahaan terhadap manajemen laba masih menjadi area perdebatan dalam studi empiris, yang ditandai oleh hasil-hasil yang tidak seragam. Untuk kedua variabel tersebut, beberapa penelitian melaporkan adanya dampak yang signifikan, sementara penelitian lainnya menyajikan temuan yang berkebalikan. Perbedaan kesimpulan inilah yang mengindikasikan perlunya eksplorasi lebih mendalam melalui penelitian selanjutnya.

Selain itu, penelitian yang secara spesifik menggunakan entitas infrastruktur di bawah naungan Kementerian BUMN beserta anak perusahaannya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel, jumlahnya masih sangat terbatas. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki karakteristik unik, seperti tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, pengawasan pemerintah, dan ukuran perusahaan yang besar, yang

bisa saja memengaruhi praktik manajemen laba secara berbeda dibandingkan perusahaan sektor lainnya.

Penelitian ini menjadikan perusahaan infrastruktur di bawah Kementerian BUMN beserta anak perusahaannya sebagai objek penelitian. Dalam sektor ini, aspek-aspek seperti audit kelayakan proyek dan pelaporan keuangan menjadi poin penting. Perusahaan infrastruktur di bawah Kementerian BUMN beserta anak perusahaannya memegang peran penting dalam membangun dan mengelola fasilitas publik seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, serta utilitas (listrik, air, telekomunikasi) untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung bertumbuhnya ekonomi berkelanjutan. Studi ini khusus memfokuskan pada perusahaan infrastruktur BUMN dan anak perusahaannya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), entitas dengan mayoritas saham dimiliki pemerintah, meskipun sebagian sahamnya diperdagangkan secara publik. Pemilihan perusahaan infrastruktur di bawah Kementerian BUMN dan anak perusahaannya yang terdaftar di BEI didasarkan pada peran strategisnya sebagai pelaksana proyek-proyek vital pemerintah, ketahanan kinerja dalam menghadapi tantangan eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian kebijakan, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan aset dan pendapatan yang stabil setiap tahunnya.

Perusahaan infrastruktur di Indonesia, khususnya yang bernaung di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaannya yang terdaftar pada BEI, menghadapi dinamika persaingan yang unik. Meskipun BUMN mendominasi proyek-proyek besar di sektor ini dan memiliki posisi monopoli relatif dalam beberapa bidang, persaingan tetap berlangsung ketat, terutama dalam mendapatkan proyek-proyek yang terbatas dan dalam menghadapi kompetisi dari perusahaan swasta serta pemain asing yang semakin aktif.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya saing, perusahaan infrastruktur berlomba-lomba meningkatkan kualitas kinerja dan reputasi mereka. Pelaporan keuangan yang jujur dan terbuka merupakan salah satu indikator yang dapat diamati tentang kinerja suatu bisnis. Namun, manajemen laba manipulasi laporan keuangan sering kali didorong oleh ekspektasi pemangku kepentingan dan tekanan persaingan.

Perusahaan infrastruktur di bawah Kementerian BUMN beserta anak perusahaannya, meskipun mereka menerima penugasan dari pemerintah, tapi mereka wajib menyusun laporan keuangan yang transparan dan memenuhi target kinerja tertentu. Apalagi untuk perusahaan yang telah listing di bursa efek, kinerja mereka bisa dilihat publik lewat laporan keuangan yang diunggah di laman internet resmi perusahaan. Praktik manajemen laba tidak selalu berarti manipulasi negatif, bisa juga sebagai strategi perusahaan dalam mengelola informasi keuangan agar perusahaan terlihat stabil dan kredibel di mata pemerintah, investor, dan publik. Dalam konteks penugasan, manajemen laba membantu menyelaraskan pelaporan keuangan dengan kebutuhan proyek penugasan. Tekanan kinerja dari pemerintah dan publik mendorong manajemen untuk mengelola laba guna mencapai target yang diharapkan, menjaga kepercayaan, dan mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Manajemen laba dalam perusahaan infrastruktur dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Manajemen laba berbasis akrual dilaksanakan melalui perubahan cara atau estimasi akuntansi saat menyusun laporan keuangan tanpa memberi dampak pada arus kas perusahaan. Sebaliknya, manajemen laba riil dilaksanakan dengan manipulasi aktivitas operasional perusahaan, seperti manipulasi pendapatan, pengurangan biaya discretionary, dan overproduksi, yang berdampak langsung pada arus kas perusahaan.

Persaingan bisnis yang ketat mendorong manajer perusahaan untuk berpikir kreatif dan mencari keunggulan kompetitif, satu diantaranya lewat penerapan manajemen laba yang berhubungan dengan perencanaan pajak serta pemanfaatan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, studi ini mengangkat judul "Pengaruh Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Infrastruktur di Bawah Kementerian BUMN dan Anak Perusahaannya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2024."

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terkait dengan fenomena yang sudah dijelaskan yakni di antaranya:

1. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Infrastruktur di bawah Kementerian BUMN dan Anak Perusahaannya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Infrastruktur di bawah Kementerian BUMN dan Anak Perusahaannya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Infrastruktur di bawah Kementerian BUMN dan Anak Perusahaannya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024.
2. Menganalisis pengaruh Perencanaan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Infrastruktur di bawah Kementerian BUMN dan Anak

Perusahaannya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Studi ini ini berpotensi sangat membantu dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan tepat sasaran khususnya pada sektor perusahaan infrastruktur di bawah Kementerian BUMN beserta anak perusahaannya. Dengan mendapat pemahaman yang lebih baik terkait bagaimana variabel seperti perencanaan serta ukuran perusahaan memengaruhi praktik manajemen laba, pemerintah dan regulator dapat merancang kebijakan perpajakan yang mampu meminimalkan praktik manipulasi laba dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Misalnya, pemerintah bisa membuat aturan yang lebih jelas dan pemantauan yang lebih intensif terhadap laporan keuangan perusahaan infrastruktur BUMN dan anak perusahaannya. Hal ini akan membantu mengurangi praktik manipulasi laporan keuangan dan membuat perusahaan lebih patuh membayar pajak.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berfungsi untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kesadaran yang dimaksud adalah mengenai bagaimana manajemen laba di BUMN infrastruktur dan anak perusahaannya dapat dipengaruhi oleh strategi perencanaan pajak dan ukuran perusahaan. Harapannya, kesadaran ini akan mendorong praktik pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, yang esensial untuk memperbaiki kepatuhan pajak, meningkatkan

pendapatan negara, dan menopang pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti

Peneliti akan dapat memahami dan memperluas pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat uraian terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat landasan teori yang relevan, konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian, kerangka penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis yang akan diuji.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini memuat uraian terkait desain penelitian, populasi dan sampel, jenis serta teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang diterapkan.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini memuat uraian terkait deskripsi objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, saran untuk penelitian berikutnya, serta uraian terkait keterbatasan

penelitian.

